

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia telah memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan, menetapkan prioritas pembangunan, dan mempertanggungjawabkan capaiannya kepada masyarakat. Namun, semakin besarnya kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tuntutan yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak publik dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Kewenangan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya mampu mengelola keuangan secara efektif dan efisien, tetapi juga mempertanggungjawabkannya secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama (Firmansyah et al., 2022). Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah daerah mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Nuryani & Firmansyah, 2020). Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tata kelola pemerintahan yang baik, karena mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Firmansyah et al., 2022).

Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang perlu diwujudkan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi diharapkan dapat memberikan gambaran yang wajar mengenai posisi keuangan pemerintah daerah dan berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih tepat. Sebaliknya, kualitas pelaporan

keuangan yang rendah berpotensi menimbulkan asimetri informasi, mengurangi kepercayaan publik, dan membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Indikator yang lazim digunakan untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Opini audit merupakan pernyataan profesional yang disampaikan oleh pemeriksa untuk menilai tingkat kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu kepatuhan terhadap SAP, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (BPK RI, 2025). BPK mengeluarkan empat macam opini, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), berarti dapat dikatakan bahwa laporan keuangan entitas tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan bebas dari salah saji material. Semakin baik opini audit yang diperoleh menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang semakin baik pula (Sasmita, 2021).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual telah diterapkan oleh pemerintah daerah di Indonesia sejak tahun 2015. Tujuan dari penerapan SAP ini adalah untuk meningkatkan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Di bawah standar ini, informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah lebih relevan untuk digunakan oleh pemangku kepentingan untuk memahami kondisi keuangan suatu entitas pemerintah daerah. Namun demikian, tantangan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah masih ada hingga kini.

Tabel 1. 1
Opini Audit Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2015-2024

No.	Opini	Total
1	Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP)	178
2	Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP)	12
3	Opini Tidak Wajar (TW)	0
4	Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	0
Total		190

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2025 (diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan opini audit yang dikeluarkan BPK RI untuk kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2015-2024. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 yang dipublikasikan oleh BPK, capaian opini audit atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015–2024 menunjukkan terdapat 178 LKPD memperoleh opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat melaporkan laporan keuangan yang tinggi. Opini tersebut menandakan bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar sesuai dengan SAP, sistem pengendalian internal yang memadai dan bebas dari salah saji material atas pos-pos laporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Sementara terdapat 12 LKPD yang masih memperoleh WDP. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun laporan keuangan secara umum telah disajikan secara wajar dan sistem pengendalian internal yang memadai, namun masih terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan, sehingga kualitas pelaporan keuangan belum sepenuhnya optimal.

Ditinjau dari perkembangan selama periode pengamatan, hasil audit BPK terhadap LKPD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan adanya peningkatan kualitas opini yang diperoleh pemerintah daerah. Opini WTP pada tahun 2015 adalah 63% kemudian meningkat menjadi 100% pada tahun 2024, meskipun dalam periode tersebut terjadi disrupsi besar akibat

pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi fiskal daerah dan perubahan prioritas belanja karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk mendukung penanganan sektor kesehatan serta pemulihan ekonomi. Peningkatan opini tersebut menunjukkan perbaikan dalam pelaporan keuangan dan tata kelola keuangan daerah. Hal ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di tingkat daerah.

Namun demikian, peningkatan opini WTP tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut terlihat dari masih tingginya kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan portal informasi publik pemerintah, yaitu InfoPublik.id yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Sumatera Barat telah menangani 51 perkara dengan 91 terpidana telah dieksekusi dan jumlah pemulihan negara sebesar Rp7.577.173.881 sepanjang tahun 2024. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat juga berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp2.258.161.000 pada tahap penyidikan yang melibatkan 3 kasus dan 21 tersangka. Salah satu kasusnya adalah kasus korupsi dana operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2023. Tersangka yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Umum menyalahgunakan kewenangannya dengan menarik dana operasional tanpa disertai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan mentransferkannya ke rekening pribadi. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp3,098 miliar, meskipun sebagian kerugian telah berhasil dipulihkan sebesar Rp1,6 miliar.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun LKPD telah memperoleh opini WTP, masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Di tengah peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, masih terdapat juga kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Dimana seharusnya menurut Avis et al. (2017), audit pemerintah berperan dalam menurunkan tingkat korupsi di masa mendatang. Selain itu, De Mingo & Cerrillo (2018) juga menyatakan bahwa transparansi yang lebih tinggi berhubungan dengan tingkat korupsi yang lebih

rendah. Oleh karena itu, menarik untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan kualitas pelaporan keuangan antar pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mencoba mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Faktor-faktor tersebut meliputi belanja modal, ukuran pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah, status pemerintah daerah, pengalaman kepala daerah, dan usia kepala daerah. Belanja modal adalah salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Belanja modal pada umumnya dialokasikan sebagai sarana pembangunan daerah untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas publik, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan efektif dan efisien (Fathia & Rusdi, 2020). Dalam teori *stewardship*, pemerintah daerah sebagai pengelola dana publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan belanja modal secara wajar dan transparan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pengelolaan belanja modal yang dilakukan dengan tepat tidak hanya berperan sebagai instrumen pembangunan, melainkan juga meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas (Wijayanti & Kartikasari, 2025).

Faktor selanjutnya yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar atau luas suatu entitas tertentu yang diukur dengan total aset pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Daerah dengan ukuran yang besar cenderung mewujudkan tanggung jawab pengelolaan, yaitu transparansi yang lebih tinggi (Rakhman & Wijayana, 2019). Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, pemerintah daerah dengan anggaran atau aset yang besar diharapkan memiliki sumber daya manusia yang lebih mahir, teknologi informasi yang lebih maju, dan infrastruktur pendukung yang memadai (Aurelia et al., 2024).

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah

(PAD) tanpa ketergantungan tinggi terhadap transfer dari Pemerintah Pusat. Tingkat kemandirian keuangan yang lebih tinggi mencerminkan kapasitas fiskal dan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang lebih baik. Pemerintah daerah dengan kemandirian keuangan yang lebih tinggi dianggap lebih kaya sebab mereka mampu mengumpulkan lebih banyak pendapatan dari sumber-sumber domestik, daripada dari transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya dalam pemanfaatan teknologi informasi maupun mempekerjakan konsultan untuk mendukung sistem akuntansi, sehingga meningkatkan kemungkinan menghasilkan laporan keuangan berkualitas lebih tinggi (Yudhanto & Rahmawati, 2025).

Faktor selanjutnya yang juga memengaruhi kualitas pelaporan keuangan yaitu status pemerintah daerah. Status daerah merupakan pengakuan nasional di Indonesia terhadap suatu daerah sebagai suatu kabupaten atau kota. Perbedaan antara kota dan kabupaten biasanya tercermin dalam tingkat perkembangan wilayah kota yang lebih maju, sehingga lebih menarik bagi individu kompeten. Penelitian oleh Rakhman & Wijayana (2019) menunjukkan bahwa pemerintah daerah di kota cenderung menghasilkan kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi.

Selain 4 faktor karakteristik pemerintah daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga 2 faktor karakteristik kepala daerah yang turut memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu pengalaman kepala daerah dan usia kepala daerah. Pengalaman kepala daerah merupakan akumulasi jumlah tahun berapa lama seseorang menjabat sebagai kepala daerah (bupati atau wali kota) pada daerah yang sama pada saat tahun penelitian (2015-2024). Kepala daerah memainkan peran kunci dalam kepemimpinan pemerintah daerah (Aurelia et al., 2024). Menurut teori *stewardship*, kepala daerah yang memiliki lebih banyak pengalaman cenderung memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar atas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan daerah. Pengalaman yang lebih panjang juga dianggap memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengelola tata kelola pemerintahan,

termasuk pengelolaan keuangan daerah. Semakin banyak pengalaman kepala daerah suatu pemerintah daerah, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut (Rakhman & Wijayana, 2019).

Usia kepala daerah juga dipandang sebagai faktor yang dapat memengaruhi gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Perbedaan usia dapat mencerminkan tingkat kematangan, kehati-hatian, serta orientasi kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan keuangan publik. Kepala daerah yang lebih tua mempunyai pengalaman yang lebih banyak sehingga ia dapat menggunakan pengalamannya tersebut untuk lebih hati-hati saat menentukan informasi yang tepat dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, maka akan dilihat pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini.

Sebagai perbandingan dari faktor ini, maka akan didasarkan juga pada beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Wijayanti & Kartikasari (2025) pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Aurelia et al. (2024) pada Pulau Sumatera menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sementara itu, penelitian Levana Dhia Prawati & Etty Murwaningsari (2024) pada pemerintah daerah di Indonesia menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Selanjutnya terkait dengan ukuran pemerintah daerah, pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan dapat dilihat pada penelitian Yudhanto & Rahmawati (2024) pada seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Namun temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heni Wijayanti dan Lisa Kartikasari (2025) pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Pada penelitian Rakhman & Wijayana (2019), kemandirian keuangan daerah menjadi faktor pembeda yang kuat antara pemerintah daerah yang menerima opini WTP untuk laporan keuangan. Peluang pemerintah daerah untuk menerima opini WTP lebih tinggi dibandingkan opini WDP, opini TW, bahkan opini TMP. Sedangkan menurut penelitian Aurelia et al. (2024) kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Selanjutnya terkait dengan status pemerintah daerah. Dalam penelitian kualitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Aurelia et al. (2024) pada Pulau Sumatera, didapatkan status pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian oleh Rakhman & Wijayana (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang berlokasi di kota lebih cenderung menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan mereka. Sementara itu, penelitian Wijayanti & Kartikasari (2025) menunjukkan bahwa status pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Terkait dengan pengalaman kepala daerah, pada penelitian Aurelia et al. (2024) pengalaman kepala daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Temuan yang sama ditemukan juga pada penelitian Prawati & Murwaningsari (2024) bahwa pengalaman kepala daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian Wijayanti & Kartikasari (2025) pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa pengalaman kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Terakhir, berkaitan dengan usia kepala daerah. Dalam penelitian Aurelia et al. (2024), usia kepala daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian Prawati & Murwaningsari (2024) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu usia kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian terkait pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah, status

pemerintah daerah, pengalaman kepala daerah, dan usia kepala daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah masih menunjukkan adanya inkonsistensi hasil penelitian.

Dalam penelitian ini penulis memilih Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada sebagai populasi dan sampel penelitian. Meneliti determinan kualitas pelaporan keuangan dalam konteks Provinsi Sumatera Barat menarik karena alasan-alasan berikut. Pertama, kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sangat tinggi, dibuktikan dengan penerimaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat pada tahun 2024. Meskipun di satu sisi kasus korupsi masih cukup tinggi. Secara teoritis, peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang diproksikan melalui opini audit diharapkan berkorelasi negatif dengan tingkat korupsi. Hal ini karena pelaporan keuangan yang berkualitas mencerminkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, sehingga dapat menekan peluang terjadinya korupsi. Kedua, penelitian mengenai determinan kualitas pelaporan keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan kombinasi variabel yaitu belanja modal, ukuran pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah, status pemerintah daerah, pengalaman kepala daerah, dan usia kepala daerah belum ada hingga saat ini.

Ketiga, Provinsi Sumatera Barat salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik pemerintah daerah yang beragam, baik dari sisi ukuran pemerintah daerah, kapasitas fiskal, belanja modal, maupun karakteristik kepala daerah. Provinsi Sumatera Barat juga terdiri dari berbagai kabupaten dan kota dengan karakteristik ekonomi, geografis, dan administratif yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan daerah, pengendalian internal, serta penyusunan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu. Perbedaan tersebut berimplikasi pada variasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Keberagaman tersebut menjadikan Provinsi Sumatera Barat sebagai konteks yang representatif untuk menguji pengaruh belanja modal,

ukuran pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah, status pemerintah daerah, pengalaman kepala daerah, dan usia kepala daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan. Terakhir, pemilihan Provinsi Sumatera Barat didasarkan juga pada pertimbangan kemudahan pelaksanaan penelitian, karena peneliti telah memahami regulasi serta karakteristik daerah, sehingga diharapkan dapat memaksimalkan proses penelitian dan meningkatkan kualitas hasil yang diperoleh.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, ada beberapa perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini menggunakan kombinasi variabel independen, yaitu belanja modal, ukuran pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah, status pemerintah daerah, pengalaman kepala daerah, dan usia kepala daerah, yang belum banyak diteliti secara bersamaan dalam satu model analisis. Kedua, masih sedikit penelitian yang menggunakan variabel karakteristik kepala daerah, yaitu pengalaman dan usia kepala daerah, terhadap kualitas pelaporan keuangan dalam konteks pemerintahan (sektor publik). Ketiga, pemilihan periode pengamatan terbaru dan lebih panjang, yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Terakhir, fokus penelitian yang secara khusus meneliti mengenai kualitas pelaporan keuangan pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih belum banyak disoroti secara mendalam dalam literatur-literatur sebelumnya.

Selain itu, adanya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu mendorong dilakukannya penelitian ini untuk menguji kembali pengaruh antara belanja modal, ukuran pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah, status pemerintah daerah, pengalaman kepala daerah, dan usia kepala daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dimana penelitian ini menjadi penting bagi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat menambah bahan pertimbangan bagaimana faktor-faktor yang secara khusus diuji dalam penelitian ini akan memberikan kesimpulan yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pelaporan keuangan nantinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan

rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan publik.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Determinan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah meliputi:

1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2024?
2. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2024?
3. Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2024?
4. Apakah status pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2024?
5. Apakah pengalaman kepala daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2024?
6. Apakah usia kepala daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, maka tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Mengkaji pengaruh belanja modal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2024.
2. Mengkaji pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2024.
3. Mengkaji pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2024.
4. Mengkaji pengaruh status pemerintah daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2024.
5. Mengkaji pengaruh pengalaman kepala daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2024.
6. Mengkaji pengaruh usia kepala daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Pihak-pihak relevan berikut ini diharapkan memperoleh manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi Penulis

Diharapkan bahwa dengan adanya penelitian ini maka penulis dapat menambah ilmu pengetahuan secara empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Almamater

Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai panduan atau referensi untuk penelitian masa mendatang bagi mahasiswa/i di

UNAND, terutama berkaitan dengan komponen-komponen yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi kajian untuk membantu evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian landasan teori, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang pendekatan dan jenis penelitian, model penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi data, analisis data, temuan penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dari hasil analisis data, saran yang disusun berdasarkan hasil dan temuan penelitian, serta keterbatasan penelitian yang menguraikan faktor-faktor yang mungkin memengaruhi hasil.